

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentu penulis membutuhkan suatu bernama referensi tulisan. Dimana hal itu membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam halnya penulis, mengambil dari beberapa macam format bentuk tulisan. Diantaranya ada buku, jurnal, artikel dan media elektronik lainnya. Tentunya tulisan-tulisan tersebut masih memiliki korelasi dengan topik yang ingin penulis bawakan, diantaranya :

*Pertama*, terdapat hasil penelitian yang berjudul “Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020” yang dituliskan oleh Suswanta dan M Rafli pada 2021. Pada tulisan ini terdapat permasalahan tentang pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana ia menjabarkan suatu fenomena dalam kata-kata yang deskriptif. Pada tulisan ini terdapat poin yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab dari ketidaknetralitasan Aparatur Sipil Negara ini, salah satu yang menjadi faktor penyebab terbesar adalah adanya motif untuk mendapatkan/mempertahankan jabatan/materi/proyek. Dimana pada posisi ini antara pemilih dan yang dipilih memiliki hubungan primer dengan calon petahana.<sup>9</sup> Dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang saya tulis,

---

<sup>9</sup> Suswanta, M. Rafi, *Pilkada Era Pandemi: Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Pustaka Belajar: Yogyakarta, 2021.

tentu semakin memperkuat bahwa indikasi terkait pengaruh pertahana ini semakin kuat yang dapat memengaruhi Aparatur Sipil Negara atau dapat dikatakan anggotanya, dimana hal petahana ikut bersaing dalam kontestasi pemilihan ini terjadi di Pemilihan Walikota Depok 2020.

*Kedua*, pada literatur ini yang berjudul “Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Kantor Kesekretariatan DPRD Kota Depok dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Depok” yang dituliskan oleh Helma Liyani pada 2019 silam. Pada tulisan ini memaparkan terkait bentuk-bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum kota Depok 2019. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Melalui wawancaranya terdapat keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan-kegiatan politik praktis seseorang. Dalam prakteknya, ternyata keterlibatan Aparatur Sipil Negara Kantor Sekretaris Dewan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Kota Depok dilakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>10</sup> Keterlibatan tersebut juga dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan kampanye. Hal ini pun memperkuat dari tulisan yang sedang saya tulis, dimana dugaan terkait netralitas di birokrasi kota Depok masih minim, masih sering terjadi sebuah pelanggaran Aparatur Sipil Negara terkhusus menjelang ajang demokrasi atau pemilihan.

---

<sup>10</sup> Helma Liyani, *Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Kantor Kesekretariatan DPRD Kota Depok dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Depok*, Skripsi Ilmu Politik. 2018.

*Ketiga*, pada literatur yang ketiga ini memiliki judul “Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent” yang dituliskan Andri Ristiani pada tahun 2016. Pada tulisan ini memaparkan bagaimana kekuatan politik yang berkuasa di arena demokrasi lokal di era reformasi. Pada tulisan ini juga menjelaskan dinamika praktik demokrasi lokal yang masih mencuatkan masalah. Pada masalah pemilihan umum kepala daerah ini menandakan konfigurasi dan kualitas politik dan demokrasi tingkat lokal belum matang. Seperti adanya *shock* dari elit politik lokal yang menyambut otonomi politik sehingga banyaknya kasus calon gubernur, bupati/walikota khususnya petahana memanfaatkan fasilitas negara. terkait demokrasi dan kekuasaan politik, para petahana ini ingin melawan karena ketersediaan sumber daya, seperti memegang atau disebut diskon kampanye dana kampanye yang tidak tersedia bagi lawan.<sup>11</sup> Tentu dalam tulisan ini juga memperkuat dari apa yang sedang saya teliti, dimana seorang individu yang merupakan petahana mengikuti sebuah kontestasi pemilu tentu terdapat banyak *previllege*, seperti yang dikatakan diatas, diskon kampanye, dimana ia sudah selangkah lebih maju dari pada lawannya yang bukan petahana. Namun hal tentu melanggar atau penyelewengan kekuasaan pemerintah itu sendiri.

**Tabel 1.0 Penelitian Suswanta, M Rafli Helma Liyani Andre Ristian**

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian

<sup>11</sup> Andri Ristiani, *Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent*, Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2016, hal. 190.

<p>Suswanta, M Rafli (2021)</p>	<p>Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020</p>	<p>Dalam tulisan ini dimana membahas seputar Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Serentak 2020 di Indonesia. Dimana penulis menjabarkan cukup detail terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada setiap provinsi di Indonesia. Tulisan ini juga menyadari bahwasanya penting untuk dijelaskan bagaimana sebaran pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara itu terjadi, bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan, apa yang menjadi sebuah faktornya, apa sumber dari pelanggaran tersebut dan bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan netralitas Aparatur Sipil Negara ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut terkhusus dalam</p>
-------------------------------------	---	---



		<p>ruang public, harus dilakukan semacam perubahan-perubahan paradigma yang signifikan untuk memastikan netralitas birokrasi sebagai tugas dan prinsip esensial Aparatur Sipil Negara yang tidak dapat dinegosiasikan secara politik. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran karakter dan pendalaman demokrasi, seperti transparansi, akses informasi dan akuntabilitas birokrasi, sehingga ketika birokrasi bertindak secara tidak netral, semua pihak dapat mengawasi dan mendesak pejabat yang memiliki otoritas dalam eksekusi pelanggaran untuk bertindak dengan cara yang tepat dan dapat diamati. Selain itu, reformasi regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa pembinaan netralitas</p>
--	---	---

		Aparatur Sipil Negara tidak dikendalikan oleh pejabat politik melainkan pejabat karier. <sup>12</sup>
Helma Liyani (2019)	Keterlibatan Aparatur Sipil Negara Kantor Kesekretarian DPRD Kota Depok dalam Pemilu Legislatif 2019 Di Kota Depok	Helma Liyani melalui tulisan memaparkan bentuk bentuk keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu kota Depok 2019. Melalui wawancaranya terdapat keterlibatan ASN dalam kegiatan-kegiatan politik Praktis seseorang. Dalam prakteknya, ternyata keterlibatan Aparatur Sipil Negara Kantor Sekretaris Dewan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 Kota Depok dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Keterlibatan tersebut juga dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan kampanye.

<sup>12</sup> Suswanta, M. Rafi, *Pilkada Era Pandemi: Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Serentak 2020*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

<p>Andre Ristian (2016)</p>	<p>Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent</p>	<p>Pada tulisan ini memaparkan bagaimana kekuatan politik yang berkuasa di arena demokrasi lokal di era reformasi. Pada tulisan ini juga menjelaskan dinamika praktik demokrasi lokal yang masih mencuatkan masalah. Pada masalah pemilihan kepala daerah ini menandakan konfigurasi dan kualitas politik dan demokrasi tingkat lokal belum matang. Seperti adanya shock dari elit politik lokal yang menyambut otonomi politik sehingga banyaknya kasus calon gubernur, bupati/walikota khususnya petahana memanfaatkan fasilitas negara. Terkait demokrasi dan kekuasaan politik, para petahana ini ingin melawan karena ketersediaan sumber daya, seperti memegang atau disebut diskon kampanye</p>
-----------------------------	--	--



		<p>dana kampanye yang tidak tersedia bagi lawan.<sup>13</sup> Dapat dikatakan petahana ini melawan karena terdapat modal yang lumayan. Namun hal ini tentunya melanggar atau penyelewengan kekuasaan pemerintah itu sendiri.</p>
--	--	--

**Sumber : Diolah sendiri dari Ketiga Penelitian Suswanta, Helma Liyani dan Andri Ristiani**

## **2.2.Kerangka Konseptual**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep yang relevan guna menunjang dan mempermudah dari keberlangsungan penulisan penelitian. Konsep-konsep tersebut terdiri dari Konsep Kekuasaan Politik, Konsep Pengaruh dan Konsep Birokrasi.

### **2.2.1. Konsep Kekuasaan Politik**

Pada dasarnya dalam ilmu politik, Konsep kekuasaan merupakan inti politik.<sup>14</sup> Banyak pula ilmuwan-ilmuwan ilmu politik yang mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan

<sup>13</sup> Andri Ristian, *Demokrasi dan Kekuasaan Politik Calon Incumbent*, Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2016, hal. 190.

<sup>14</sup> Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik*. CV. PUSTAKA SETIA: Bandung, 2013, hal. 53.

memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Sedangna W.A. Robson mengatakan bahwa :

“.....studi ilmu politik ini sendiri mempelajari bagaimana kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil.”<sup>15</sup>

Sementara itu menurut Miriam Budiardjo ia mengatakan bahwasananya :

“.....Politik merupakan sebuah usaha mengapai kehidupan yang baik.”<sup>16</sup>

Tentu dalam hal tersebut, dimana politik merupakan sebuah proses daripada dinamika pertumbuhan atau pengembang yang mana berupaya guna mencapai kehidupan yang lebih baik atau sejahtera, tentu hal ini tidak menutup kemungkinan akan bersinggungan dengan aspek kekuasaan itu sendiri.

Dalam kekuasaan sendiri, seorang ahli, Robert M. Mac Iver mengatakan bahwa :

“.....kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberikan perintah ataupun secara tidak langsung dengna mempergunakan segala alat dan cara tersedia.”<sup>17</sup>

Sedangkan pada Charles F. Audrain ini mendefinisikan :

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 13.

<sup>17</sup> Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik*, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2013, hal. 53.

“.....kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan dari orang lain).”<sup>18</sup>

Sejalan dengan itu, Miriam budiarjo mengartikan bahwa :

“.....kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.”<sup>19</sup>

Sedangkan berdasarkan Harlod D. Laswell dan Abraham Kaplan mereka mendefinisikan :

“.....bahwa kekuasaan sendiri merupakan sebuah hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama.”

Jika kita berkaca pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan ini memiliki kata dasar yaitu kuasa. Kuasa sangat beragam sekali definsiinya. Jadi kuasa sendiri mempunyai arti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), atau kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus) sesuatu atau orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili) atau mampu, sanggup, kuat atau pengaruh (gengsi, kesetian) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya).<sup>20</sup> Pada berlandasan Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, dapat dikatakan teradpat 3 indikator pada kuasa itu sendiri, diantaranya terdapat kemampuan, kewenangan dan pengaruh.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Abdulkadir B. Nambi, Muhammad Rusdiyanto Puluhuluwa, *Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Poltiik)*. Gorontalo. 2005, hal. 276.

Pada dasarnya, kekuasaan berbicara, bagaimana kita (yang memegang kekuasaan pada wilayah atau sektor tertentu) mempengaruhi individu-individu yang ada didalam wilayah kekuasaan untuk sesuai dengan kemauan atau keinginan dari penguasa/ pemilik kekuasaan tersebut. jadi secara umum, kekuasaan ini dapat menimbulkan atau memunculkan sebuah sanksi dan pengaruh, sarjan Politik ternama, Roberh Dahl, mengatakan mengenai kekuasaan yang pertama pada *The Concept Of Power* (1957). Ia melihat kekuasaan itu sebagai konsep pokok dan mengatakan bahwa :

*“A mempunyai kekuasaan atas B Sejauh ia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan”*. Tentu dari hal ini cukup berkorelasi sangat erat antara, kekuasaan dengan pengaruh.<sup>21</sup>

Pada konteks kekuasaan ini, terdapat pula berbagai unsur-unsurnya, setidaknya terdapat tiga komponen penting dalam keberlangsungan kekuasaan. 3 komponen tersebut diantaranya :

*“.....(1) Unsur Influence, dimana pada unsur ini menitikberatkan pada pemimpin yang menyakinkan sambil berargumentasi yang mana membuat individu atau objek dari kekuasaan ini melakukan perubahan pada tingkah lakunya. (2) Unsur Persuation, pada Unsur ini dimana fase pemimpin memiliki kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (bujukan atau rayuan) baik dalam hal positif maupun hal negative, sehingga muncullah unsur manipulasi. (3) Unsur Coercion, unsur Coercion atau paksaan ini merupakan terusan daripada unsur persuasive, dimana paksaan atau desakan (berupa kekuasaan unsur force atau kekuasaan massa termasuk dengna kekuatan militer) ini terjadi dikarenakan proses menyakinkan objek kekuasaan tersebut.”<sup>22</sup>*

---

<sup>21</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 67.

<sup>22</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara Press, 2009, hal. 33.

Tentu berangkat dari pemaparan paragraf-paragraf diatas, dan jika kita kombinasi dari sisi kekuasaan dan politik, tentu mempunyai makna yang lebih luas lagi, seperti diantaranya :

“.....(1) Kekuasaan merupakan sebuah hubungan antar individu manusia. (2) Pemegang kekuasaan ini memengaruhi pihak lain. (3) Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi ataupun pemerintah. (4) Sasaran daripada kekuasaan ini (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok organisasi ataupun pemerintah (negara). (5) Suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif itu. (6) Penggunaan sumber-sumber tersebut mungkin melibatkan secara paksaan, consensus ataupun kombinasi keduanya. (7) Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi dari jalan prosesnya politik.”<sup>23</sup>

Jadi dapat dikatakan pada konsep kekuasaan ini terkhusus pada sisi politik. Dengan adanya atau dengan mempunyai kekuasaan ini, salah satu pihak atau individu yang memilikinya dapat menggunakannya guna mempengaruhi dari individu-individu lainnya. Hal tersebut dilakukan atau terjadi supaya individu yang dipengaruhi bersikap tunduk dan patuh terhadap keinginan dan perintah dari individu yang memiliki kekuasaan tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik : Kajian Mendasar Ilmu Politik*, Malang: Intrans, 2015, hal. 202.

<sup>24</sup> Denayu Swami Vevekananda, *Perilaku Politik dan Kekuasaan Politik (Studi Perpindahan Partai Politik Basuki Tjahaja Purnama dalam Perpolitikan Di Indonesia)*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik. 2017, hal. 30.

Tentu dalam keberlangsungannya kekuasaan politik ini juga terdapat berbagai macam bentuknya, sama seperti point unsur diatas. Maka dari itu Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan terdapat 3 bentuk, diantaranya :

” .....(1) Kekuasaan Legal Formal, pada kekuasaan ini berlandaskan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Dapat dikatakan kekuasaan ini adalah kekuasaan yang sah berdasarkan peraturan yang ada ditempat ia memiliki posisi tersebut. (3) Kekuasaan Karismatik, kekuasaan karismatik ini didasarkan pada mutu cukup berkualitas dari pemimpinnya sebagai pribadi yang memiliki daya Tarik, sehingga memberikan inspirasi bagi para pengikutnya. (4) Kekuasaan Tradisional, pada kekuasaan ini merupakan suatu kekuasaan yang dimiliki seseorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya, sehingga para pengikutnya yang telah mempunyai kepatuhan terhadap pemimpinnya terdahulu secara otomatis akan mengikut dan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin mereka yang baru.”<sup>25</sup>

Jadi setelah banyaknya definisi atau pembahasan seputar kekuasaan politik ini, jadi pada dasarnya, kekuasaan politik merupakan sebuah hubungan antar individu ataupun kelompok, yang terjadi sebuah moment mendominasi untuk mempengaruhi individu satu ke individu lainnya, tentu dengan berbagai cara atau kemampuan yang ia punya. Kemudian dengan menggunakan pengaruh tersebut, ia akan bertujuan untuk kepentingan dari kelompok yang mempengaruhi itu sendiri. Dalam hal politik tentu tujuan yang sangat dekat atau kental yaitu bagaimana mempengaruhi individu lain untuk mendapatkan keinginannya berupa unsur-unsur untuk mendapatkan tahta kekuasaan suatu wilayah.

---

<sup>25</sup> Faqih Muhdyanto, Dkk, *Analisis Teori Otoritas Max Webber dalam Kepemimpinan Dukun Adat di Masyarakat Suku Tengger*. Surakarta: Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant: 2016, hal. 6.

### 2.2.2. Konsep Pengaruh

Pada dasarnya pengaruh merupakan suatu kata kerja yang memiliki arti cukup beragam, hal bisa terjadi jika kita melihat dari berbagai kacamata masing-masing sesuai dengan konteks apa yang ingin dibangun. Namun, berangkat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh sendiri mempunyai arti dimana terdapat kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, semamcam orang, benda ataupun dalam membentuk watak, kepercayaan dan perbuatan seseorang.<sup>26</sup>

Sedangkan dilain sisi, Pengaruh ini memiliki pemahaman lain seperti, Pengaruh ini mempunyai atau lebih condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan pada diri seseorang untuk menuju ke arah yang lebih, ada pula, pemahaman bahwa pengaruh merupakan sebuah keadaan dimana terdapat hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>27</sup>

Secara pendapat para Ahli, dimana mereka terdapat Hugiono dan Poerwantana yang mengatakan bahwa

“.....pengaruh merupakan dorong atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek.”<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Badudu dan Zain mengatakan,

“.....Pengaruh adalah salah satu daya yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang

---

<sup>26</sup> Virda Gesela Rexady, *Pengaruh Komunikasi Persuasif Suhay Salim terhadap Keputusan Pembelian Skincare Safi (Studi Pada Mahasiswi Ekonomi Islam Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, Skripsi Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. 2019, hal. 29.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Hugiono dan Perwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT Bina Aksara, 2020.

lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuasaan orang lain.”<sup>29</sup>

Sedangkan menurut Norman Barry, ia memandang pengaruh sebagai

berikut :

“.....Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang, jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi.”<sup>30</sup>

Pada dasarnya memang pengaruh merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu dalam membuat atau menentukan perilaku individu lain. Hal ini dikarenakan pengaruh sendiri dalam proses penggunaannya atau implementasi, kerap kali menggunakan berbagai sumber daya atau alat yang dimiliki oleh individu tersebut. Dapat dikatakan dalam proses tersebut segala cara ditempuh atau dimanfaatkan untuk mendapatkan penentu dari perilaku individu lain agar mengikuti keinginan atau perintah dari pemberi pengaruh.

Jika berbicara pengaruh dalam pembahasan politik, tentu tidak jauh berhubungan dengan kekuasaan. Maka dengan itu, adanya pengaruh dan kekuasaan merupakan bagian dari satu kesatuan seperti yang diucapkan oleh Floyd Hunter, ia berpendapat bahwa :

“.....Kekuasaan merupakan pengertian pokok dan pengaruh merupakan bentuk khususnya.”

Tentu dalam hal ini, konteks pengaruh ini sangat lekat pada aspek komunikasi. Komunikasi disini merupakan suatu elemen vital, dimana komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan dari satu individu

---

<sup>29</sup> Babadu dan Zain, *Kamus Umum Bahas Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

<sup>30</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 67.

kepada individu lainnya. mulai dari komunikasi yang tersirat ataupun komunikasi tersurat. Serta dalam bentuk komunikasi apapun itu seperti, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi massa. dan kelompok publik.<sup>31</sup> Maka dari itu, komunikasi inilah yang menjadi indikator daripada keberlangsungan pengaruh tersebut dari satu individu kepada individu lainnya.

Berangkat dari paragraph sebelum dapat dikatakan bahwa pengaruh ini merupakan salah satu bentuk reaksi yang muncul (dapat berupa tindakan atau keadaan) dari suatu perlakuan akibat dorongan untuk mengubah atau membentuk ssesuaut keadaan kearah yang lebih baik ataupun justru kebalikan yaitu lebih buruk atau penyelewengan. Selain lekat dengan aspek komunikasi, konsep pengaruh ini juga cukup dekat dengan aspek kekuasaan.

Apa yang sudah dipaparkan diatas, tentu dalam pengaruh ini cukup penting dalam keberlansungan dalam suatu organisasi, wadah, instansi dan lainnya, namun tujuannya dapat menjadi positif ataupun negatif. Terlepas daripada itu, ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh individu-individu yang berada dalam sebuah organisasi untuk mempengaruhi individu lainnya. hal ini berdasarkan hasil penelitian Yukl, Lepsinger dan Lucia pada 1992, ia memunjukkan tedapat setidaknya Sembilan jenis taktik yang biasa digunakan untuk mempengaruhi didalam organisasi, diantaranya :

---

<sup>31</sup> Nur Laila Trisnawati, *Bentuk Komunikasi Anggota Tuli dalam Membangun Solidaritas Kelompok*, Skripsi Ilmu Komunikasi, 2018, hal. 7.

“(1) Persuasif Rasional, Pada hal ini terjadi jika individu mempengaruhi individu lain dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti-bukti nyata agar orang lain tertarik. (2) Daya Tarik Inspirasional, Taktik ini terjadi semisal individu mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairah pada orang lain. (3) Konsultasi, Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang yang dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembentukan suatu rencana yang akan dilaksanakan. (4) Mengucapkan Kata-Kata Manis, Pada point ini terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan, memberikan pujian ataupun sikap bersahabat dalam memohon sesuatu. (5) Daya Tarik Pribadi, Hal ini terjadi pada saat individu mempengaruhi individu lainnya untuk memintanya melakukan sesuatu karena merupakan teman atau Loyal. (6) Pertukaran, Pada point ini, terjadi saat seseorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan sesuatu keuntungan tertentu kepada orang yang dijadikan target setuju. (7) Koalisi, Koalisi yang dimaksud adalah jika seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk atau sebagai alasan agar orang yang dijadikan target setuju. (8) Tekanan Terjadi semisal individu mempengaruhi individu lainnya dengan menggunakan ancaman, peringatan atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. (9) Mengesahkan, Mengesahkan yang dimaksud adalah saat seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya, kekuasaannya atau dengan mengatakan suatu permintaan adalah sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi.”<sup>32</sup>

Jadi berangkat dari pemaparan paragraf diatas, dapat dikatakan konsep pengaruh merupakan sebuah komunikasi baik secara langsung atau tidak langsung yang timbul oleh seseorang individu dan dapat mengatur atau mengontrol individu lainnya dengan berbagai jenis metode, Tentu pada konsep ini, pengaruh ini memang dapat menimbulkan sesuatu hal lainnya, sesuatu lainnya dalam artian positif ataupun negatif pada keberlangungannya.

---

<sup>32</sup> Mari Merry Marianti *Kekuasaan dan Taktik Mempengaruhi Orang Lain dalam Organisasi*. Vol.7, No.1: hal. 45–58, (ISSN:0216–1249), 2011, hal. 53.

### 2.2.3. Konsep Birokrasi

Pada dasarnya birokrasi adalah sebuah element penting dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dimana dengan adanya birokrasi adalah konsekuensi dari tugas utama dari sebuah negara itu sendiri. Dimana yang harus melayani dari kehidupan bermasyarakat. Untuk itu negara membangun suatu sistem yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya atau yang disebut dengan nama birokrasi. Kata birokrasi ini pula sudah tidak asing ditelinga masyarakat. Hal ini dikarenakan fenomena adanya birokrasi sudah melekat dengan negara itu sendiri. Birokrasi bukan suatu fenomena yang baru. Karena sebenarnya secara bentuk yang sederhana telah ada dan dikenal sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Para ahli meyakini bahwa fenomena birokrasi ini sudah dipakai oleh administaasi pemerintahan Romawi, Inca, Aztec, Mesir Kuno dan Cina Kuno.<sup>33</sup> Hal itu terbukti dengan adanya pejabat-pejabat suatu kerajaan kuno yang mengalami atau melalui masa seleksi dengan sistem ujian, senioritas dan keahlian-keahlian tertentu.

Dalam hal sejarah, birokrasi ini dibawakan oleh 2 filosof yang berasal dari negara Perancis yaitu Baron de Grimm dan Vincent de Gournay. Hal ini muncul dari negara yang mengalami atau dapat dikatakan birokrasinya sangatlah buruk terkhusus dalam hal kinerjanya. Di Prancis sendiri tak jarang pemimpin atau rajanya melakukan semacam pesta mewah

---

<sup>33</sup> Muhamad, *Birokrasi Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance*, Unimal Press: Sulawesi, 2018, hal. 5.

ditengah kelapan atau kesengsaraan yang sedang dilanda oleh rakyatnya. Di lain hal pemimpinnya melakukan pemunggutan pajak yang teramat tinggi bagi rakyatnya.<sup>34</sup>. Dengan adanya fenomena tersebut, dimana kinerja dari pejabat atau penyelenggara negara yang sangat buruk. Muncul istilah *bureaumania*, istilah ini digunakan untuk menyindir dari kinerja pejabat tersebut sekaligus istilah ini digunakan untuk menggambarkan akan suatu organisasi pelaksana kegiatan pemerintahan negara.

Dengan munculnya kata "*Bureaumania*" ini yang dibawakan oleh Baron de Grim. Yang mana bermula dari suatu ejekan dari kebobrokan kinerja suatu organisasi pemerintah. kata tersebut kemudian menyebarluas ke setiap sudut negara terkhusus Eropa. Seperti Jerman muncul pula kata "*Kureaukukratie*", dalam bahasa Italia menjadi "*Burocrazia*" dan pula pada bahasa Inggris yang kata tersebut menjadi "*Bureaucracy*". Dengan perbedaan nama yang cukup variasi namun makna dari kata birokrasi tersebut tetaplah sama. Secara umum birokrasi dapat dimaknai sebagai organisasi rasional, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa birokrasi merupakan organisasi yang dapat diselenggarakan secara rasional kemudian birokrasi dapat juga dipahami sebagai sesuatu yang bersifat normatif yang dimana dijalankan oleh aktor yaitu negara atau pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk kehidupan masyarakat di negara tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Yudi R sufiana, Cahya Supriatna, "*Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*". Alfabeta: Bandung. Hal. 1.

Berangkat dari salah satu buku dari akademisi ternama, Miftah Thoha. Ia mengatakan bahwa birokrasi pemerintah seingkali dikatanya sebagai *officialdom* atau kerajaan pejabat.<sup>36</sup> Dimana pada fenomena tersebut suatu kerajaan yang mana raja-rajanya ialah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Mereka individu dalam birokrasi tersebut bekerja dalam tatanan pola hierarkis sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya.<sup>37</sup> Ia juga mengatakan bahwa suatu biro ini merupakan jawaban yang rasional terhadap rangkaian-rangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Dimana birokrasi merupakan sarana untuk mengimplementasikan tujuan tersebut.<sup>38</sup>

Berdasarkan para Ahli, Max Weber berpendapat bahwa birokrasi merupakan suatu sistem yang memiliki struktur, diatur secara normatif dan memiliki mekanisme agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional dan efektif. Menurut Blau dan Page, Birokrasi yang dimaksudkan guna melaksanakan tugas administrasi yang besar.<sup>39</sup>

Tentu dalam pandangan beberapa ahli diatas tersebut, suatu birokrasi haruslah terdapat individu yang menanamkan etos kerja yang baik. Selain daripada itu, tentunya setiap birokrasi diisi oleh individu-individu yang memiliki standar tertentu yang haruslah dipenuhi oleh setiap individu didalamnya. Hal-hal tersebutlah yang akan menjadikan suatu integritas

---

<sup>36</sup> Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2003, hal. 2.

<sup>37</sup> Ibid, Hal. 2.

<sup>38</sup> Ibid, Hal. 20

<sup>39</sup> Muhamad, *Birokrasi Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance*, Unimal Press: Sulawesi. 2018, hal. 13.

yang baik pada hal kinerja birokrasi dalam pelayanan publik maupun hal administrasi lainnya. Disisi lain yaitu Syafiie, merumuskan sautu cara-cara yang spesifik untuk birokrasi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksinya, diantaranya :

“.....(1) Kerja yang ketat pada peraturan. (2) Tugas yang khusus. (3) Tugas yang khusus. (4) Kaku dan sederhana. (4) Penyelenggara yang resmi. (5) Pengaturan dari atas ke bawah (Hirarkhis) yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi. (6) Berdasarkan logika. (7) Tersentralistik. (8) Taat dan Patuh. (9) Tidak melanggar ketetnuan. (10) Terstuktur. (11) Tanpa pandang bulu.”<sup>40</sup>

Poin-poin tersebutlah yang seharusnya menjadi bekal dari setiap individu-individu didalamnya. Ditambah dalam ranah perpolitikan, suatu individu yang terdapat didalam lingkup birokrasi, haruslah netral dan bebas dari intervensi politik. Pada hal tersebut bertujuan dengan tujuan dari birokrasi itu sendiri. Dimana individu yang berada didalam birokrasi merupakan abdi negara dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang professional dan berkualitas, bukan melayani kepentingan kelompok kecil, pribadi ataupun calon politik tertentu.<sup>41</sup> Masih dengan ahli yang sama yaitu Max Weber, ia mengatakan suatu birokrasi yang dibentuk haruslah independen dari kekuatan politik dan diposisikan sebagai kekuatan yang netral.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Anak Lestari, *Pengaturan Birokrasi Aparatur Sipil Negara Yang Netral dan Bebas dari Intervensi Politik*, Jurnal Kertha Semaya: Bali, 2020 hal, 1922.

<sup>42</sup> Aswin Eka Adhi, Herman, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian. Hal. 92.

Dalam konteks kenegaraan, kehidupan pengorganisasian disebut birokrasi pemerintahan. Dalam era demokratisasi, dilema dalam hubungan antara penjabaran nilai-nilai demokrasi dan realitas manajemen organisasi birokrasi di masyarakat menjadi hal yang pelik, rumit serta problematik. Dimana dalam proses operasionalnya cenderung dianggap kurang fleksibel dan kurang efisien. Pada perjalanan pemerintahan Indonesia ini pula, pernah mengalami perubahan yang cukup drastis pada suatu sistem birokrasinya atau biasa disebut dengan reformasi birokrasi.

Masih menurut ahli yang sama Max Weber dia mengatakan bentuk dari suatu birokrasi yang rasional dalam keberlangsungannya, dimana tentu ada beberapa cara untuk mendapatinya, terdapat didalam buku Miftah Thoha, Max Weber menyebutkan :

“(1) Pada pejabat secara personal bebas, namun yang perlu diingat, ia dibatasi oleh jabatannya. Dimana individu tersebut tidak bebas dalam hal menggunakan jabatannya untuk kepentingan sepihak atau pribadinya. (2) Setiap individu dalam birokrasi diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. (3) Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. (4) Setiap pejabat dengan gembalang tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya daripada instansinya guna mempengaruhi kepentingan pribadi ataupun sepihak.”<sup>43</sup>

Maka dari itu, secara birokrasi yang memang kunci daripada keberlangsungan pelayanan untuk masyarakat, sangat penting baginya memegang prinsip independent atau berdikari. Seperti yang dituliskan diatas, secara keberlangsung, tentu sebuah jabatan tidak dibenarkan dalam

---

<sup>43</sup> Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2003, hal. 18.

dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau sepihak, terlebih untuk kepentingan-kepentingan dari konstetasi politik seorang. Dalam prosesnya ini untuk menciptakan suatu birokrasi yang berdikari, tentu harus melibatkan dari semua aspek yang ada didalam birokrasi tersebut, seperti perilaku pada aspek sistemnya, sturuktur, proses maupun budaya dari birokrasi pemerintah.<sup>44</sup>

Dimana yang menjadi poin penting ialah, kemampuan dari berperilaku individu pegawai professional yang tentu dilandasi nilai, norma, etika, pengalaman, pengetahuan, keterampilan serta motivasi belajar bagi maslahat organisasi pemerintahan ini. Dengan hal tersebut, tentu menjadi suatu kualitas atau integritas yang tertanam pada setiap individu yang menjalani birokrasi tersebut. Sehingga secara sadar dan bertanggungjawab dalam menjalan birokrasi yang independen ataupun bebas dari praktik politik.

Pada dasarnya Birokrasi ini merupakan sebuah unsur yang sangat penting dari keberlangsungan kehidupan bernegara. tentu secara realitasnya birokrasi ini merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat, hal tersebut dikarenakan tugas sebagai pelayan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan tugasnya terdapat berbagai macam etika ataupun etos yang memang harus diaati dan diikuti oleh individu-individu yang ada di birokrasi tersebut. Guna mensukseskan daripada keberlangsungan tugasnya

---

<sup>44</sup> Yudi Rsufiana, Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangan*, Alfabeta: Bandung. Hal. 157.

sendiri. terkhusus pada aspek politik, individu-individu dalam birokrasi ini haruslah memang teguh dari asas birokrasi tersebut terlebih pada poin netralitas, hal ini akan berdampak pada keindepedenan dari birokrasi tersebut.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Judul yang diangkat beserta kajian terdahulu dan juga berbagai konsep yang peneliti gunakan. Dapat dikatakan bahwasanya dengan adanya fenomena Pemilihan Walikota Kota Depok Tahun 2020 ini membuat peserta dalam kontestasi pemilihan tersebut seperti menjadi obyek yang dipilih (petahana) dan menjadi subyek yang memilih (salah satunya Aparatur Sipil Negara).

Tentu pada keberlangsungannya, dimana seperti yang kita ketahui pada kontestasi pemilihan ini terdapat 2 unsur penting, yaitu si individu yang akan dipilih dan ada pula individu yang menjadi pemilih. Pada kasus yang terjadi di Kota Depok terkhusus pada moment Pemilihan Walikota Tahun 2020 nya, dimana dari sisi individu dipilih merupakan individu-individu petahana.

Seperti yang kita ketahui, dengan muncul petahana yang maju dalam kontestasi politik ini, dengan modal yang cukup mumpuni dari sisi birokrasinya. Hal tersebut dapat dikatakan sebuah kelebihan dalam modal politik dari individu tersebut. dengan mengetahui medan politik, dengan mengetahui sudut-sudut dari elemen yang ada di birokrasi terkhusus pada elemen Aparatur Sipil Negeranya. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut

ditambah petahana yaitu individu yang memang sudah memimpin 1 periode sebelum. Tentu secara jabatan, merupakan jabatan strategis dalam birokrasi pemerintah kota.

Dengan jabatan strategis tersebut, tentu secara otomatis memegang kekuasaan yang memimpin dari berbagai aspek didalam birokrasi tersebut. seperti yang kita ketahui, berdasarkan pengertian dari Harlod D. Laswell dan Abraham Kaplan mereka mendefinisikan bahwa

“.....kekuasaan sendiri merupakan sebuah hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.<sup>45</sup>”  
Kemudian berhubungan dengan pemangku kekuasaan tersebut, dimana tentu memiliki pengaruh yang cukup besar bagi elemen-elemen yang dibawahinya.

Kemudian balik lagi pada konstestasi politik tersebut pun terdapat pemilih yaitu masyarakat dengan berbagai kalangan profesi, salah satu dari profesi tersebut ialah Aparatur Sipil Negara. dengan berkorelasi paragraf diatas, pada Aparatur Sipil Negara ini merupakan elemen yang dibawahih oleh pelaku petahana tersebut. Tentu jika dikorelasikan dengan konsep kekuasaan politik dan konsep pengaruh dari seseorang pemegang kekuasaan terlebih petahana tersebut, akan terdapat beberapa hal kerawanan dalam keberlangsungan pemilihan tersebut terkhusus pada pelanggaran.

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya memang Aparatur Sipil Negara ini merupakan inividu yang terdapat didalam birokrasi pemerintah,

---

<sup>45</sup> Salman Luthan, “*Hubungan Hukum dan Kekuasaan*”. Jurnal Hukum No. 2 Vol 14: Yogyakarta, 2007, hal. 169.

pada keberlangsungannya, birokrasi pemerintah sebagai bentuk badan pelayanan publik harusnya bersifat netral dalam berpolitik, agar tidak terdapat halangan-halangan dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Beribcara kerawanan, pada petahana inilah yang menjadi faktor utama dalam kecederaaan birokrasi itu sendiri, terkhsuus pada ketidaknetralitasan birokrasinya.



**Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Peneliti**

